

**DISERTASI**

**PENGEMBANGAN PARIWISATA DINAS KEPEMUDAAN  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**SOFYAN B.  
E013191006**



**PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PENGEMBANGAN PARIWISATA DINAS KEPEMUDAAN  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**TOURISM DEVELOPMENT SERVICE OF SPORTS AND  
TOURISM IN SIDERENG RAPPANG DISTRICT**

**DISERTASI**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor  
Program Studi Administrasi Publik

Disusun dan diajukan oleh

**SOFYAN B.  
E013191006**

Kepada

**PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**

**PENGEMBANGAN PARIWISATA DINAS KEPEMUDAAN,  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan diajukan oleh

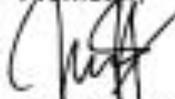
**SOFYAN B.**

**E013191006**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 02 Mei 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

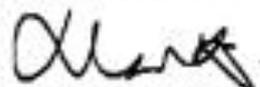
Menyetujui

Promotor,



Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.  
NIP 195708181984031002

Co. Promotor,



Dr. Muhammad Rusdi, M.Si.  
NIP 197003011999031001

Co. Promotor,



Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.  
NIP 196801011997022001

Ketua Program Studi  
Administrasi Publik,



Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si.  
NIP 196012311986011005

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.  
NIP 197508182008011008

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : SOFYAN B.

Nomor Mahasiswa : E013191006

Program Studi : S3 Administrasi Publik

Menyatakan bahwa dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul "**Pengembangan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Di Kabupaten Sidenreng Rappang**" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 03 Maret 2023  
Yang menyatakan,

**SOFYAN B.**

## **ABSTRAK**

**Sofyan B. (E013191006). PENGEMBANGAN PARIWISATA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (Disupervisi oleh Juanda Nawawi, Muhammad Rusdi, dan Hasniati)**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) menjelaskan faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. (3) menjelaskan faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis Penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan teori yaitu pengembangan pariwisata oleh Sastrayuda. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pendekatan Participatory Planning dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan keberhasilan dengan banyaknya unsur-unsur atau pihak-pihak yang ikut berperan penting dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. Faktor pendukung yaitu pendekatan potensi dan karakteristik dalam pengembangan pariwisata merupakan point utama dalam pengembangan pariwisata tersebut. Pendekatan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di wilayah destinasi wisata turut menunjukkan partisipasi atau keikutsertaan mereka dalam mengembangkan pariwisata. Faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata yaitu peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata religi.

**Kata Kunci:** Pengembangan, Pariwisata, Sidenreng Rappang.

## **ABSTRACT**

**Sofyan B. (E013191006). Tourism Development of the Office of Youth, Sports and Tourism in Sidenreng Rappang Regency (Supervised by Juanda Nawawi, Muhammad Rusdi, and Hasniati)**

This study aims to (1) Describe tourism development in Sidenreng Rappang Regency. (2) Explain the inhibiting factors in tourism development in Sidenreng Rappang Regency. (3) Explain the inhibiting factors in tourism development in Sidenreng Rappang Regency. This type of research is descriptive qualitative by way of observation, interviews, and documentation. The theoretical approach is tourism development planning by Sastrayuda. The research will be carried out in 2022.

The results showed that tourism development planning in Sidenreng Rappang Regency with a Participatory Planning Approach in tourism development in Sidenreng Rappang Regency showed success with the many elements or parties that played an important role in tourism development in Sidenreng Rappang Regency. Supporting factors, namely the potential and characteristics approach in tourism development, are the main points in planning the tourism development. The community empowerment approach shows that people who are in tourist destination areas also show their participation or participation in developing tourism. The inhibiting factors in tourism development are overlapping regulations, lack of quality human resources, lack of publications, not yet good infrastructure, lack of investment, lack of attention to environmental aspects, and lack of attention to religious tourism objects.

**Keywords:** Development, Planning, Tourism, Sidenreng Rappang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya-Nya serta salam dan shalawat tercurah kepada Muhammad Rasulullah Saw. sang teladan bagi umat manusia, yang mengantarkan dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul **“Pengembangan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Di Kabupaten Sidenreng Rappang”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar doktor pada Program Studi S3 Administrasi Publik, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

P

enulisan disertasi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses studi dan proses penyusunan disertasi ini. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si. selaku Ketua Komisi penasihat Promotor, Dr. Muhammad Rusdi, M. Si. Selaku Kopromotor I dan Dr. Hasniati, M.Si. selaku Kopromotor II atas ketulusan hati dan

kesabarannya dalam membimbing penulis dan memberikan masukan dalam menyelesaikan disertasi ini.

2. Terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Hamsinah. M.Si. selaku penguji I, Dr. Syahribulan, M.Si. selaku penguji II dan, Dr. Indrayati Nur Indar, M. Si. selaku penguji III yang telah banyak memberi saran dan masukan demi kesempurnaan disertasi ini.
3. Terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Lukman Samboteng, M. Si., selaku penguji eksternal yang telah banyak memberi saran dan masukan demi kesempurnaan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Muhammad Akmal Ibrahim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik atas pembinaan dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan studi;
5. Prof. Dr. Phil. Syukri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
6. Para Mahaguru Bapak dan Ibu dosen pengasuh mata kuliah atas curahan ilmu pengetahuannya selama masa studi dan seluruh staf yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan doktor di Universitas Hasanuddin.
7. Kedua orang tua ayahanda La Bekka dan Ibunda Isa (Almarhumah) mertua H. Roma (almarhum) dan Hj. Dewi (Almarhumah) tercinta atas semua kasih sayang, doa, bimbingan, dan dukungannya;

8. Orang yang paling spesial dalam hidup saya, Istriku tercinta Hj. Husni Roma yang tidak henti-henti selalu sabar dan setia memberikan motivasi dan doanya dalam menyelesaikan disertasi ini.
9. Anak Cucu dan menantu dan yang amat penulis sayangi dan cintai, dengan sabar memberikan motivasi dan doanya dalam menyelesaikan disertasi ini.
10. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang Prof. Dr. H. Jamaluddin, S.Sos., M.Si. dan para Wakil Rektor yang senantiasa memberikan dukungan moral dan doanya selama penulis menempuh pendidikan doktor ini.
11. Ketua, sekretaris dan rekan dosen Jurusan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang atas dukungan moral dan doanya selama penulis menempuh pendidikan doktor ini.
12. Para tenaga pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang senantiasa memberikan semangat, doa dan bantuannya dalam memudahkan pengurusan kelengkapan berkas selama menempuh pendidikan.
13. Sahabat-sahabat terbaik Program Doktor Pascasarjana Administrasi Publik angkatan 2019 atas dukungan moral dan spiritualnya yang selalu berbagi canda tawa dan suka dukanya selama menempuh studi hingga sekarang atas bantuan, semangat dan kebersamaan selama ini yang takkan terlupakan.

14. Adinda Dr. Firman Saleh, S.S., S.Pd., M. Hum. dan Dr. Sam Hermansyah, S.Pd., M. Pd. Atas bantuan, semangat dan kebersamaan selama ini dalam penyelesaian studi ini.
15. Saudara seperjuangan Dr. Safaruddin, S.Sos., M.A.P. dan L. A. Sanrang, S., S.Pd., M.Pd.I. yang selalu menemani dan selalu memberikan semangat serta bantuannya selama menempuh pendidikan dan penyelesaian studi.
16. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

P

enulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata, peneliti berharap semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan-Nya dan selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan disertasi ini. Amin.

Makassar, 03 Maret 2023

**SOFYAN B.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	10
C.    Tujuan Penelitian .....	11
D.    Manfaat Penelitian .....	11
1.    Manfaat Teoretis.....	12
2.    Manfaat Praktis.....	12
BAB II .....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A.    Penelitian Relevan .....	13
B.    Landasan Teori .....	16
1.    Pengembangan Pariwisata Dalam Perspektif Administrasi Publik.....	16
2.    Peran dan Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata .....	21
3.    Konsep Pengembangan Parawisata.....	23
4.    Jenis-Jenis Wisata.....	26
5.    Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata .....	32
6.    Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Wisata .....	38
7.    Pengembangan Pariwisata dan Masyarakat.....	44
8.    Perkembangan Bentuk Pariwisata .....	55
9.    Aspek-Aspek Penghambat Pengembangan Pariwisata .....	60
C.    Kerangka Pikir.....	66
BAB III .....	70
METODE PENELITIAN.....	70
A.    Jenis Penelitian .....	70
B.    Lokasi Penelitian .....	71

C.	Sumber Data Penelitian .....	71
1.	Data Primer.....	72
2.	Sekunder .....	72
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	72
1.	Observasi.....	73
2.	Wawancara.....	73
3.	Data Dokumentasi .....	74
4.	Focus Grup Discussion (FGD) .....	74
E.	Informan Penelitian .....	75
F.	Fokus Penelitian.....	76
G.	Teknik Analisis Data.....	77
BAB IV	.....	80
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....		80
A.	Kondisi Geografis dan Luas Wilayah .....	80
B.	Potensi Wilayah.....	81
C.	Kependudukan .....	87
D.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang .....	88
E.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	89
F.	Visi, Misi dan Program .....	93
BAB V	.....	96
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....		96
1.	Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang .....	96
2.	Faktor Pendukung Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	164
BAB VI	.....	200
PENUTUP .....		200
A.	Kesimpulan.....	200
B.	Saran.....	203
1.	Aspek Praktis.....	203
2.	Aspek Teoretis.....	203
C.	Novelty Penelitian .....	204
D.	Rekomendasi Pengembangan Pariwisata .....	204
DAFTAR PUSTAKA	.....	206

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

<b>Gambar 1.</b>	Prinsip Sustainable Tourism Development	42
<b>Gambar 2.</b>	Kerangka Pikir	69
<b>Gambar 3.</b>	Peta Administrasi Sidenreng Rappang	81
<b>Gambar 4.</b>	Struktur Organisasi Dinas	89

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.</b> Potensi Penghasil Tanaman Sayur	82
<b>Tabel 2.</b> Potensi Penghasil Jenis Sayur	82
<b>Tabel 3.</b> Potensi Produksi Tanaman Sayuran	83
<b>Tabel 4.</b> Potensi Produksi Jenis Tanaman	84
<b>Tabel 5.</b> Potensi Tanaman Biofarnika Jahe dan Lengkuas	85
<b>Tabel 6.</b> Potensi Tanaman Biofarnika Kencur dan Kunyit	85
<b>Tabel 7.</b> Potensi jumlah Buah Mangga dan Durian	86
<b>Tabel 8.</b> Potensi jumlah buah jeruk dan pisang	87
<b>Tabel 9.</b> Jumlah Penduduk	88

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pariwisata menjadi suatu komoditas baik perseorangan maupun berkelompok sehingga sampai saat ini pariwisata telah menjadi potensi dalam menambah devisa negara, meningkatkan perekonomian masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan pengembangan sosial dan memelihara budaya. Pariwisata Indonesia mulai dikembangkan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1969 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan kepariwisataan Nasional. Usaha-usaha yang dilakukan sesuai dengan pasal 4 Inpres No.9 Tahun 1969 yaitu: 1) memelihara/membina keindahan dan kekayaan alam serta kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai daya tarik kepariwisataan, 2) menyediakan atau membina fasilitas-fasilitas transportasi, akomodasi, entertainment dan pelayanan pariwisata lainnya yang diperlukan, termasuk pendidikan kader. 3) menyelenggarakan promosi kepariwisataan secara aktif dan efektif di dalam maupun di luar negeri.

Pengembangan pariwisata yang dimiliki oleh setiap negara dapat menjadi modal utama dengan adanya potensi alam, budaya, dan potensi buatan dalam menggerakkan roda perekonomian. Peranan sektor pariwisata nasional semakin menunjukkan sentimen positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya adalah

kontribusinya terhadap penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha masyarakat yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia.

Perubahan perkembangan pariwisata di Indonesia dalam upaya mendatangkan wisatawan berkunjung di Indonesia. Formulasi strategi pemerintah dengan beberapa "tagline" promosi pariwisata yaitu "*Indonesia, there is more to it than Bali*", "*Indonesia, Bali and Beyond*", serta "*Indonesia, Bali plus Nine*". Pembentukan 10 daerah tujuan wisata (DTW) dalam rencana pembangunan lima tahun (pelita) III pariwisata Indonesia. Pada tahun 1980an Indonesia untuk pertama kali mengikuti *World Tourism Market* (WTM) menandai dimulainya era promosi pariwisata secara internasional, seiring dengan lahirnya 7 kebijakan strategi pokok pariwisata dalam Pelita V yakni Promosi pariwisata yang konsisten, Penambahan aksesibilitas, Mempertinggi kualitas pelayanan dan produk pariwisata, Pengembangan DTW, Promosi daya tarik alam, satwa dan wisata bahari, Mempertinggi kualitas SDM, dan Melaksanakan kampanye sadar wisata melalui Sapta Pesona.

Upaya memperkecil berbagai dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif pariwisata lahirlah pemikiran untuk mengembangkan pariwisata yang lebih berpihak pada masyarakat di sekitar objek wisata, yang kemudian dikenal dengan istilah *Community Based Tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis komunitas/masyarakat. Di Indonesia, penerapan

CBT tercantum dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada Bab III pasal 5 yaitu Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata adalah memberdayakan masyarakat setempat. Dengan demikian, Undang-Undang telah mengamanatkan bahwa pengembangan pariwisata Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat (lokal). Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 memberikan perubahan penting dalam hal pendekatan pembangunan pariwisata menjadi berbasis masyarakat.

Berkaitan dengan pandangan ilmu administrasi publik bahwa pengembangan pariwisata bisa dikaji melalui beberapa pendekatan, seperti yang dikemukakan oleh Sastrayuda (2010:50) dalam pengembangan Pariwisata meliputi pendekatan Participatory Planning, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis; Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata.

Selain itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok; Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana; Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di

suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.

Menurut Gunn (1988:87) menyatakan bahwa suatu daya tarik wisata terbentuk dari empat elemen pokok yang harus direncanakan secara terpadu, yaitu (1) rumpun daya tarik, (2) masyarakat, (3) jalur sirkulasi, dan (4) jalur hubungan. Rumpun daya tarik terbagi menjadi objek wisata alam, budaya, dan minat khusus. Akan tetapi hingga saat ini ketiga jenis objek wisata tersebut belum terintegrasi satu sama lain. Selain aspek penataan kawasan, aspek prasarana dan sarana juga kurang menunjang kegiatan wisata.

Misalnya banyaknya objek wisata namun kurang didukung dengan aksesibilitas yang ada, minimnya lahan parkir yang menimbulkan kemacetan apalagi pada hari libur panjang, jalur pelayanan jasa angkutan juga belum terintegrasi sampai ke lokasi objek wisata dan jadwal pelayanan angkutan hanya pagi sampai sore, daya dukung tanah lemah dengan banyaknya kendaraan berat yang melintas sehingga sering menyebabkan longsor pada jalan-jalan menuju lokasi ODTW, adanya permasalahan ketersediaan air bersih yang masih belum tercover secara menyeluruh, permasalahan pengangkutan sampah yang masih belum maksimal (belum adanya fasilitas pengangkutan sampah wisata tersendiri).

Aspek ketertiban, permasalahan diakibatkan oleh ketidakteraturan pedagang kaki lima dipinggir jalan yang semakin menambah kemacetan

bagi pengunjung. Kondisi ini semakin diperparah dengan penataan yang kurang tepat dan melebihi daya tampung. Hal ini dapat dilihat dari kondisi yang begitu sesak sehingga mengakibatkan pengunjung tidak leluasa menikmati wisata. Selain itu usaha untuk meningkatkan daya tarik wisata harus selalu ditingkatkan untuk mengatasi persaingan pada pangsa pasar lokal dan untuk menyediakan pelayanan yang layak bagi pengunjung pada kawasan wisata.

Merujuk kepada UU Nomor 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa wisata merupakan suatu aktivitas kegiatan perjalanan yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mendatangi objek-objek tertentu dengan tujuan untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Industri kepariwisataan mempunyai beberapa tujuan diantaranya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 1992 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 60 tahun 1992 ditetapkanlah Dekade Kunjungan Wisata (Dekuni) sebagai bagian kampanye pariwisata Indonesia dengan mengambil tema berbeda setiap

tahunnya. Data statistik perjanuari hingga desember 2015 menunjukkan pencapaian pembangunan pariwisata Indonesia mampu melampaui target. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat menjadi 10,4 juta orang dari target 2015 sebesar 10 juta orang. Adapun kunjungan wisatawan mancanegara tersebut memberikan kontribusi terhadap devisa negara sebesar Rp 144 triliun.

Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak. Sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata.

Pemerintah diharapkan mampu mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata. Mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar objek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah, begitu pula pada sektor pariwisata di

Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil pengamatan dengan didukung berbagai informasi pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditangani oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dihadapkan oleh berbagai fenomena yang dapat diidentifikasi bahwa peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata religi.

Peters dan Jhon Bryden (2004:79), mengungkapkan bahwa tujuan dari pembangunan/pengembangan pariwisata adalah memberikan dampak yang menguntungkan bagi wisatawan yang berupa kebutuhan fisik, psikis dan sosial. Ketika kebutuhan wisatawan yang terpenuhi secara memuaskan berarti mewujudkan pengembangan pariwisata. Tingkat kepuasan pengunjung sangat tergantung pada kualitas produk wisata yang akan dijual, apakah produk wisata itu benar-benar memenuhi keinginan/harapan pengunjung atau tidak. Bila harapan dan kenyataan seimbang atau sesuai dengan yang diimpikan, maka dapat disimpulkan pengunjung sudah merasa puas. Namun jika kenyataan lebih kecil dari harapan pengunjung, maka tingkat kepuasan rendah. Menurut Yoeti (1985:68), situasi yang ideal untuk menjual produk wisata adalah kombinasi dari penciptaan harapan yang tinggi (*creating high expectation*) dan memuaskan dengan kenyataan/pelayanan sesuai atau melebihi apa

yang diharapkan dari sebuah kualitas produk wisata.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Aditya pada tahun 2018 yang berjudul Formulasi Strategi Pengembangan Destinasi Objek Wisata di Kawasan Pecinan Kapasan Surabaya, Rizki melihat formulasi strategi pengembangan destinasi objek wisata dengan menggunakan alat bantu analisis yaitu SWOT. Hasil analisis dan temuan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ditentukan oleh: (1) daya kompetitif yang rendah untuk menghadapi ancaman dari destinasi objek wisata lainnya oleh karena itu diperlukan strategi defensive yang memfokuskan pada objek wisata yang disukai oleh masyarakat sekitar dan pengunjung, (2) meningkatkan informasi dan promosi, (3) memanfaatkan dana bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dana CSR yang ditawarkan oleh pihak swasta, (4) pembenahan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan fasilitas pengunjung.

Penelitian yang dilakukan oleh Afisi Sabri (2014) yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Objek Wisata Danau Bandar Kayangan di Kota Pekanbaru, Afisi melihat Analisa strategi pengembangan objek wisata ditentukan oleh: (1) diperlukannya pembagian danau bandar kayangan menjadi beberapa zona, (2) membuat masterplan arahan dalam pengembangan objekwisata danau bandar kayangan, (3) peningkatan fasilitas dalam pengelolaan objek wisata danau bandar kayangan, (4) optimalisasi dan efesiensi penggunaan anggaran dalam pengembangan objek wisata danau bandar kayangan. Lebih jauh M Rian Saputra (2016),

melalui penelitiannya yang berjudul Strategi Pengembangan Objek Wisata di Kawasan Gunung Andong Magelang, strategi pengembangan destinasi objek wisata dengan menggunakan alat bantu analisis yaitu SWOT.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ditentukan oleh: (1) meningkatkan fasilitas melalui peningkatan pelayanan dan fasilitas seperti jasa pemandu wisata, poster dan penyediaan alat untuk pendakian, (2) melakukan promosi intensif mengenai objek wisata, melakukan kerjasama dengan investor, dan melakukan pelatihan dan pendidikan untuk sumber daya manusia, serta membangun toko-toko cenderamata, (3) menyediakan alat transportasi untuk pengunjung objek wisata dan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk promosi objek wisata, (4) mengajukan proposal permohonan bantuan ke pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana.

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi awal (28 Oktober dan 6 November 2021), dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memfokuskan pada formulasi kebijakan yang bersifat infrastruktur namun tidak pada cagar budaya atau strategi. Kondisi kepariwisataan Kabupten Sidenreng Rappang sendiri sampai saat ini belum teroganisir dengan baik sehingga objek wisata yang satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung. Berbagai kritik tersebut tentu sangat penting untuk dijawab, konsep pengembangan pariwisata saat ini berusaha untuk meningkatkan peran aktif masyarakat sehingga mengurangi tingkat kekurangan ekonomi dan

memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam konteks ini, pengembangan pariwisata di Kabupaten khususnya diberbagai wilayah pedesaan/kelurahan dinilai cukup signifikan dilakukan.

Pengembangan pariwisata merupakan satu dari sedikit pilihan yang layak untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi pedesaan. Melalui pariwisata, akan terjadi perbaikan infrastruktur, aliran modal masuk. Kewirausahaan, dan arus barang dan jasa yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar. Salah satu media yang mampu mengalihkan atau mendistribusi peluang ekonomi dari daerah perkotaan ke kelurahan adalah pariwisata. Transfer peluang sumber daya ekonomi ini penting mengingat kawasan kelurahan Lawawoi masih terperangkap oleh pusaran kuat kemiskinan yang ditandai antara lain oleh aktivitas non-pertanian yang lemah, keterbatasan infrastuktur dan akses yang terbatas terhadap jasa-jasa yang penting. Pariwisata dapat mengakselerasi: (a) Pertumbuhan dan kestabilan ekonomi, (b) Perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, (c) Perbaikan dan pemeliharaan layanan publik dan infrastuktur dasar, serta berbagai rumah adat yang sudah terbengkalai dan (e) revitalisasi industri kerajinan, tradisi, dan identitas budaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan formulasi isu yang disampaikan pada latar belakang

masalah, penelitian ini mencoba mencari penjelasan-penjelasan empirik atas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang ?
2. Bagaimana faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini maka tujuan yang dicapai sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Menganalisis dan menjelaskan faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah hasil penelitian diharapkan dapat berfungsi inovatif. Selain itu, diharapkan dapat menambah khasanah wacana dan referensi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu penelitian juga diharapkan mampu berkontribusi kepada masyarakat luas, dan dapat memengaruhi kebijakan bagi pengembangan dan pelaksanaan pembangunan bangsa. Berdasarkan pada pandangan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

## **1. Manfaat Teoretis**

Memberikan sumbangsih pemikiran kepada para ilmuwan dan praktisi administrasi publik, Sumbangsih pemikiran yang dimaksud dalam hal penerapan Formulasi Strategi Pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyelesaikan masalah publik, khususnya Pengembangan Objek Wisata.

## **2. Manfaat Praktis**

Memberikan sumbangsih kepada pemerintah daerah, *Stakeholder*, Lembaga non pemerintah, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal mengelola masalah publik, khususnya pengembangan objek wisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Relevan**

Almuktabar, 2004. dalam Desertasi yang berjudul: Formulasi Strategi Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Daerah (Studi tentang Pemanfaatan sumber daya manusia setempat di kabupaten Bulukumba). Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa harapan utama pihak luar, harapan utama pihak dalam, pangkalan Data, dan nilai-nilai Kepemimpinan berpengaruh sangat signifikan terhadap pemanfaatan sumber daya daerah.

Andi Risma Jaya, 2017 Dalam Desertasi berjudul: Manajemen Strategik pengembangan Kawasan parawisata dinas kebudayaan dan parawisata kabupaten Bulukumba. Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa diperlukan perhatian lebih pemerintah daerah dalam manajemen strategik pengembangan Kawasan parawisata, faktor internal dan eksternal yang menghambat dan mendukung dalam penegembangan parawisata harus lebih diutamakan kekuatan atau potensi wisatanya.

Rizky Aditya, Dalam Desertasi Berjudul: Formulasi Strategi Pengembangan Destinasi Objek Wisata di Kawasan Pecinan Kapasan Surabaya, Rizki melihat formulasi strategi pengembangan destinasi objek wisata dengan menggunakan alat bantu analisis yaitu SWOT. Dimana hasil analisis dan temuan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ditentukan oleh: (1) daya kompetitif yang rendah untuk menghadapi

ancaman dari destinasi objek wisata lainnya oleh karena itu diperlukan strategi defensive yang memfokuskan pada objek wisata yang disukai oleh masyarakat sekitar dan pengunjung, (2) meningkatkan informasi dan promosi, (3) memanfaatkan dana bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dana CSR yang ditawarkan oleh pihak swasta, (4) membenahan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan fasilitas pengunjung.

Afisi Sabri dalam Desertasi yang berjudul: Analisis strategi. Pengembangan Objek Wisata Danau Bandar Kayangan di Kota Pekanbaru, Afisi melihat Analisa strategi pengembangan objek wisata ditentukan oleh: (1) diperlukannya pembagian danau bandar kayangan menjadi beberapa zona, (2) membuat masterplan arahan dalam pengembangan objek wisata danau bandar kayangan, (3) peningkatan fasilitas dalam pengelolaan objek wisata danau bandar kayangan, (4) optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pengembangan objek wisata danau bandar kayangan.

M Rian Saputra Dalam Desertasi yang Berjudul: Strategi Pengembangan Objek Wisata di Kawasan Gunung Andong Magelang, strategi pengembangan destinasi objek wisata dengan menggunakan alat bantu analisis yaitu SWOT. Dimana hasil analisis dan temuan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ditentukan oleh :

1. meningkatkan fasilitas melalui peningkatan pelayanan dan fasilitas seperti jasa pemandu wisata, poster dan penyediaan alat untuk pendakian.

2. Melakukan promosi intensif mengenai objek wisata, melakukan Kerjasama dengan investor, dan melakukan pelatihan dan pendidikan untuk sumber daya manusia, serta membangun toko-toko cenderamata.
3. Menyediakan alat transportasi untuk pengunjung objek wisata dan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk promosi objek wisata
4. Mengajukan proposal permohonan bantuan ke pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana.

Penelitian-penelitian terdahulu merupakan rekomendasi temuan penelitian yang telah dilakukan khususnya yang berkaitan dengan Pengembangan Pariwisata. Berikut disajikan dalam Tabel berikut:

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengembangan Pariwisata Dalam Perspektif Administrasi Publik**

Menurut Bakaruddin (2008:17) pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok untuk sementara waktu, dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha dan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, akan tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna tamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Pariwisata berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “pari” berarti penuh, sedangkan “wisata” artinya perjalanan. Sehingga secara keseluruhan pariwisata diartikan sebagai segala fenomena atau gejala dan hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan atau persinggahan yang dilakukan oleh seseorang untuk berbagai tujuan. Secara etimologis pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”, pari berarti banyak, berkali-kali, berulang-ulang, sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian, jadi pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang dari suatu tempat ke tempat lain

Pengertian lainnya tentang pariwisata adalah, suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti, 1996:118).

Upaya pembangunan sektor pariwisata melibatkan seluruh masyarakat, disamping penyelenggara Negara dan swasta. Meskipun sudah banyak pelaksanaan dan upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata tersebut. Pemerintah dalam hal ini sangat tergantung dari dukungan masyarakat dan swasta. Ini berarti untuk tercapainya keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, perlu adanya dukungan kesadaran dedikasi serta loyalitas dari segenap masyarakat selanjutnya Administrasi publik saat ini menjadi istilah yang tidak asing seiring dengan perkembangan jaman. Istilah ini tidak asing karena telah berkembang dikalangan masyarakat. Kalangan ilmuwan Administrasi publik, seperti yang dikemukakan oleh Chandler dan Plano dalam Pasolong (2011:7) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “public affairs” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikanperbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Perkembangan ilmu pengetahuan, administrasi publik telah tumbuh dan dikenal dengan sejumlah “paradigma” yang menggambarkan adanya perubahan dan perbedaan dalam tujuan, teori, dan metodologi atau dalam bangunan epistemologi serta nilai yang mendasari. Perkembangan paradigma administrasi publik, khususnya dari Nicholas Henry (1975:27), sudah cukup dikenal di kalangan15 generasi muda ilmuwan dan sarjana

administrasi negara” di Indonesia (Sedarmayanti, 2010:7).

Nicholas Henry dalam Sedarmayanti (2010:7), memusatkan pengamatannya atas “lokus dan fokus” dari ilmu administrasi seperti di anjurkan Golembiewski (1977:54), membagi perkembangan ilmu pengetahuan administrasi negara meliputi 5 paradigma yang berlangsung dari tahun 1927 sampai tahun 1970 (dan seterusnya), khususnya di negara Eropa dan Amerika Serikat. Nicholas Henry dalam (Pasolong, 2011:28) mengemukakan lima paradigma administrasi publik, yaitu: 1). Paradigma dikotomi antara Politik dan Administrasi (1900-1926),. 2). Prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937). 3). Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970). 4). Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970), administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. 5). Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara (1970).

Sedarmayanti (2010:7) mengungkapkan adanya paradigma dalam bidang ilmu pengetahuan administrasi negara yang telah berkembang selama ini, namun kemudian menambahkan 1 paradigma lain yaitu “administrasi negara baru” , dimana berbagai dimensi dan aplikasi “nilai” yang ingin diwujudkan merupakan fokus pokok mengenai paradigma ini.

Frederickson dalam (Pasolong, 2011:30-32) mengemukakan enam paradigma administrasi publik yaitu sebagai berikut: 1). Paradigma pertama, Birokrasi Klasik. 2). Paradigma kedua, Birokrasi Neo-Klasik. 3). Paradigma ketiga, Kelembagaan. 4). Paradigma keempat, Hubungan

Kemanusiaan. 5). Paradigma kelima, Pilihan Publik. 6). Paradigma Keenam, Administrasi Negara Baru.

Tahun 1992 muncul paradigma yang bersifat Reformatif yaitu *Reinventing Government* yang dicetuskan oleh David Osborne dan T. Gaebler dan kemudian dioperasionalkan oleh Osborne dan Plastrik dalam (Pasolong, 2011: 33-34). Pada dasarnya paradigma ini diinspirasi oleh Presiden Reagan melihat pemerintahan bukanlah pemecahan masalah, justru beliau melihat sebagai masalah.

Paradigma berikut dikenal dengan *New Public Management* yang melihat bahwa paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberi pelayanan publik, termasuk membangun masyarakat. Paradigma ini dikenal dengan *Banishing Bureaucracy* (memangkas birokrasi), sebagai operasionalisasi dari *Reinventing Government* diutarakan oleh Osborne dan Plastrik (1997:51-62) yang mengemukakan makna kewirausahaan/*reinventing*, sebagai transformasi fundamental terhadap sistem dan organisasi publik untuk menciptakan peningkatan secara menakjubkan dalam efektivitas, efisiensi, adaptabilitas dan kapasitasnya untuk berinovasi.

Berbagai paradigma tersebut menawarkan teori, konsep, dan pendekatan tertentu yang berguna bagi pemahaman dan pengembangan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi sistem administrasi publik bersangkutan. Kemudian strategi baru ini mencapai puncaknya dengan diterapkan prinsip *Good Governance* (kepemerintahan yang baik).

Paradigma Reinventing Government juga dikenal sebagai *New Public Management* dan menjadi populer ketika prinsip *Good Governance* diimplementasikan. Paradigma NPM melihat bahwa paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Karena itu Vigoda dalam (Pasolong, 2011: 34), mengungkapkan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip NPM.

Berkaitan dengan pandangan ilmu administrasi publik bahwa pengembangan pariwisata bisa dikaji melalui beberapa pendekatan, seperti yang dikemukakan oleh Sastrayuda (2010:50) dalam pengembangan Pariwisata meliputi:

- a. Pendekatan Participatory Planning, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis;
- b. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata;
- c. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok
- d. Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana;
- e. Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada

di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.

## **2. Peran dan Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata**

Fungsi pemerintah dalam pembangunan pada berbagai tingkatan termasuk ditingkat daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai koordinator
- b. Pemerintah sebagai perumus pengembangan strategik ;
- c. Pemerintah sebagai regulator;
- d. Pemerintah sebagai penyedia;
- e. Pemerintah sebagai pemrakarsa.

Pemerintah daerah yang memiliki otoritas dalam strategi pengembangan keparawisataan daerah harus menjembatani berbagai kepentingan sektor terkait dan para pelaku industri pariwisata melalui produk kebijakannya. Keterlibatan pemerintah dalam strategik pengembangan keparawisataan sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan sektor pariwisata. Bukan saja pemerintah yang memiliki peran penting, namun yang lebih urgen tugas dan fungsi pemerintah yang harus terlaksana secara efisien dan efektif.

Guna melakukan solusi terhadap masalah dalam masyarakat, pemerintah membuat kebijakan yang mencakup semua yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu demi

kepentingan seluruh masyarakat. Tugas pemerintah bukan hanya membuat kebijakan tetapi juga menjamin akan terlaksananya kebijakan tersebut, oleh karena itu dalam proses kebijakan publik akan terjadi interaksi antara masyarakat dengan Pemerintah. Pariwisata memiliki posisi strategis dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Peran pariwisata sangat menjunjung perkembangan perdagangan dan investasi luar negeri oleh karena itu, penetapan strategi perkembangan destinasi dan pemasaran pariwisata akan bermuara pada peningkatan devisa pariwisata menjadi sangat penting dan utama. Menurut Richardson dan fluker dalam La Ode Syaiful (2017:72-73) menyatakan umumnya strategis dalam pariwisata terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Menentukan bisnis/usaha apa yang akan dimasuki, yang biasanya dicirikan oleh misi organisasi yang tergantung pada jenis usahanya yang digeluti.
- b. Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan tujuan utama organisasi, seperti penguasaan pasar yang melibatkan pengenalan produk baru.
- c. Mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan
- d. Menganalisis informasi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan dan hambatan dari organisasi
- e. Menentukan tujuan khusus yang menentukan aktivitas yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan.

- f. Menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan.
- g. Mendistribusikan sumberdaya masing-masing program aksi untuk memberikan dampak pada strategi yang diambil.
- h. Mengimplementasikan rencana
- i. Mengontrol dan memonitoring hasil dan membuat perbaikan jika diperlukan.

### **3. Konsep Pengembangan Parawisata**

Parawisata merupakan fenomena baru dan relatif muda, tetapi memiliki tingkat pertumbuhan yang luar biasa. Meskipun begitu, parawisata dianggap belum memiliki kematangan terutama sebagai suatu bidang akademik. Menurut Hunziker dan Kraft dalam Muljadi (2012:17) mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing atau keseluruhan hubungan perjalanan itu tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah. Sehingga dalam melakukan perjalanannya tersebut hanya mencari hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Menurut Barreto dan Giantari (2015:34) Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Alasan utama dalam

pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak.

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar objek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah.

Menurut Sastrayuda (2010:50) dalam pengembangan meliputi:

1. Pendekatan Participatory Planning, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis.
2. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata.
3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.

4. Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana.
5. Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.

Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan sosial karena tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber daya yang telah ada.

Menurut Sinarta (2010:19) suatu objek wisata dikatakan layak dikembangkan apabila memiliki syarat-syarat pengembangan pariwisata antara lain:

1. *Attraction*: Segala sesuatu yang menjadi ciri khas dan menjadi daya tarik wisatawan agar mau berkunjung ke tempat wisata tersebut.
2. *Accesibility*: Kemudahan cara untuk mencapai tempat wisata tersebut

3. *Amenity*: Fasilitas yang tersedia di objek wisata tersebut seperti hotel dan restoran
4. *Ancillary*: Merupakan tambahan pendukung dimana adanya organisasi atau pihak yang mengolah objek wisata tersebut.

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berhubungan perjalanan rekreasi. Sedangkan pengertian secara umum pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang/sekelompok orang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan tujuan mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiatan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

#### **4. Jenis-Jenis Wisata**

Seorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata biasanya sekedar untuk refreshing dan untuk berjalan-jalan. Selain dari itu ada yang melakukan perjalanan wisata dengan kegiatan berupa urusan bisnis ke suatu daerah tertentu. Ada beberapa jenis pariwisata yang berdasarkan tujuan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata. Menurut Ismayanti dalam Pranata (2012:10) jenis wisata

dibagi menjadi beberapa jenis yakni sebagai berikut:

a. Wisata Kuliner

Wisata ini tidak semata-mata hanya untuk mengenyangkan dan memanjakan perut dengan aneka ragam masakan khas dari daerah tujuan wisata, tetapi juga mendapatkan pengalaman yang menarik menjadi motivasinya.

b. Wisata Olahraga

Wisata ini memadukan kegiatan olahraga dengan kegiatan wisata. Kegiatan dalam wisata ini dapat berupa kegiatan olahraga yang aktif mengharuskan wisatawan melakukan gerakan olah tubuh secara langsung. Kegiatan yang lain disebut kegiatan pasif. Dimana wisatawan tidak melakukan gerak olah tubuh, tetapi menjadi penikmat dan menjadi pecinta olahraga saja.

c. Wisata komersial

Wisatawan yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

d. Wisata Bahari

Perjalanan yang banyak dikaitkan dengan dengan olahraga air seperti danau, pantai, air laut.

e. Wisata Industri

Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan mahasiswa atau pelajar, orang-orang awam ke suatu tempat perindustrian dengan

maksud dan tujuan untuk mengadakan penelitian.

f. Wisata Bulan Madu

Suatu perjalanan yang dilakukan bagi pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.

g. Wisata Cagar Alam

Jenis wisata yang banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau cagar alam, Taman lindung, pegunungan, hutan daerah dan sebagainya, yang kelestariannya dilindungi oleh Undang-Undang.

Objek dan daya tarik wisata menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa: "segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan daerah tujuan wisatawan daerah yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata".

Menurut Muljadi (2012:89) sebuah destinasi wisata harus memiliki daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan. Dengan adanya objek daya tarik wisata yang kuat maka menjadi magnet untuk menarik para wisatawan. Pengembangan 11 kepariwisataan haruslah memiliki tiga aspek penting produk pariwisata, yaitu:

a. Atraksi. Merupakan pusat dari industri pariwisata. Maksudnya atraksi

mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri-ciri khas tertentu. Ciri-ciri khas yang menarik wisatawan adalah:

- a) Keindahan alam
  - b) Iklim dan cuaca.
  - c) Kebudayaan.
- b. Amenitas. Merupakan berbagai fasilitas penunjang para wisatawan untuk berwisata ke suatu daerah tujuan wisata dengan kenyamanan dan kepuasan tersendiri. Hal tersebut antara lain akomodasi yang nyaman, restoran, bar, layanan informasi, pramuwisata, sikap masyarakat setempat, keamanan dan lain-lain.
- c. Aksesibilitas Berhubungan dengan segala jenis transportasi, jarak atau kemudahan pencapaian suatu objek wisata. Serta unsur pendukung lainnya (pelaku industri pariwisata, masyarakat dan institusi pengembangan) yang membentuk sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan wisatawan. Menurut Ridwan (2012:5) menjelaskan bahwa pengertian objek wisata merupakan sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Berdasarkan pengertian para ahli di atas penulis memberikan batasan objek wisata adalah sesuatu yang dapat dinikmati, dirasakan dan dilihat oleh manusia sehingga menimbulkan perasaan puas dan kesenangan jasmani

maupun rohani sebagai suatu hiburan.

Dewasa ini negara-negara yang menggalakkan pembangunan industri pariwisata dihadapkan pada tantangan tertentu akibat dari pertumbuhannya yang mengalami peningkatan sangat besar, bahkan cenderung melampaui pertumbuhan ekonomi. Tantangan itu mendorong pemikiran akan kebijakan untuk mengantisipasi agar industri pariwisata itu mampu berperan sebagai katalisator pembangunan bagi sektor lain sehingga dapat mendukung perekonomian negara.

Parawisata adalah industri jasa yang digolongkan sebagai industri ketiga yang memiliki peranan yang cukup urgen dalam memberikan kesempatan kerja. Apalagi penciptaan kesempatan kerja yang permanen merupakan suatu faktor yang selalu perlu dipertahankan. Penerimaan devisa dari sektor industri pariwisata dapat dihasilkan dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan devisa dari perkembangan sektor industri barang modal.

Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui perkembangan usaha akomodasi (hotel), Makanan, minuman, pengangkutan wisata, perencana perjalanan, pramuwisata, tenaga terlatih. Pariwisata juga memerlukan prasarana ekonomi, jalan, jembatan, terminal, lapangan udara, pembangkit tenaga listrik, air bersih, fasilitas olah raga, kantor pos dan telekomunikasi, bank, dan perusahaan asuransi.

Pengembangan Kepariwisata sebagai Suatu Tuntutan Perkembangan kegiatan keparawisataan yang sangat cepat membawa

dampak terhadap peningkatan berbagai ragam produk parawisata yang terbentuk dari hasil transformasi sumber daya yang memiliki muatan. Sistem nilai dan utilitas produk yang menjadi suatu tatanan produk dengan kapabilitas dan nilai tertentu untuk dapat dinikmati oleh wisatawan dengan minat dan harapan yang dimiliki berbagai daerah objek wisata yang marak tersebut, tentunya nilai perlu diperhatikan dengan cermat agar kualitas produk dapat terjaga dan sekaligus memberikan dampak yang baik bagi perekonomian daerah setempat.

Pada pengembangan keparawisataan di Kabupaten Sidenereng Rappang suatu objek wisata unggulan, maka dalam prosesnya perencanaan harus melibatkan berbagai pihak yang saling terkait, dengan kata lainnya diperlukan koordinasi yang baik antar stakeholder keparawisataan maupun dengan pihak lainnya terkait dengan pengembangan objek wisata khususnya Datae. Selain hal tersebut bidang parawisata juga diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dengan tepat yang sesuai dengan karakteristik daerah serta melibatkan stakehoelders yang ada.

Pengembangan kepariwisataan adalah suatu pengembangan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melestarikan lingkungannya, meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mempertahankan budaya yang melibatkan stakeholders dalam bersinergi.

Berdasarkan konsep tersebut, maka yang harus direncanakan dalam rangka membangun objek wisata dengan pendekatan holistic yang

menjamin terciptanya sinergi antara bagian/sub satuan yang ada. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai pengembangan kepariwisataan maka perlu penanganan melalui perencanaan strategis yang tepat, yang mampu menemukan peluang-peluang dimasa depan sehingga mampu menyusun rencana untuk memanfaatkannya.

Kebutuhan akan perencanaan objek wisata di Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari kebutuhan untuk mencapai sasaran pengembangan keparawisataan yang ditunjukkan oleh jumlah kunjungan wisatawan yang masih mengalami penurunan dan belum mampu kembali ke angka kunjungan pra krisis ekonomi (pandemi Covid-19), kebutuhan untuk menata ulang dan rencana objek wisata dimasa yang akan datang, serta pertimbangan bahwa objek wisata di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan sektor yang memiliki banyak keterkaitan dengan sektor objek wisata lainnya, yang merupakan sifat dasar pengembangan pariwisata.

## **5. Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata**

Prinsip pengembangan kawasan wisata adalah merupakan dasar-dasar penataan kawasan yang memasukkan aspek yang perlu dipertimbangkan dan komponen penataan kawasan wisata. Beberapa aspek yang terkait dalam penataan kawasan wisata adalah:

- a. Citra (image), yaitu pandangan secara fisik (viewer exposure) atau dengan merasakan (viewer sensitivity). Pandangan secara fisik berkaitan dengan jarak, elevasi dan pergerakan pandangan.

Sedangkan pandangan yang melibatkan kepekaan perasaan tergantung pada sudut pandang, seperti karakter manusia, pendapat, pengalaman dan kesan yang ditimbulkan pada kawasan. Serta memiliki tema pengembangan, yaitu membentuk tema kawasan wisata yang mempunyai kawasan yang membedakan dengan kawasan wisata lainnya. Tema dapat berkaitan dengan kekhasan ekologi, iklim, sejarah atau sosial budaya setempat.

- b. Keteraturan, yaitu penataan kawasan yang baik dan teratur didukung desain interior dan eksterior yang menarik dengan pembagian fungsi yang jelas.
- c. Bangunan, yaitu orientasi bangunan yang sebaiknya ke arah pemandangan pegunungan. Ketinggian bangunan tidak menghalangi pandangan ke pemandangan pegunungan sehingga memberikan kesempatan bagi penduduk untuk menikmati pemandangan alam atau tidak mengacaukan garis langit (skyline).
- d. Keselamatan (safety), yaitu bertujuan untuk melindungi penduduk dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya musibah, seperti penataan yang dapat menimbulkan kecelakaan dan konflik.
- e. Keamanan (security), yaitu bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi penduduk dalam beraktivitas di kawasan atau kota seperti penataan kota yang mencegah terjadinya gangguan kejahatan/kriminal.
- f. Pedestrian Ways yaitu bertujuan memberikan kemudahan berjalan

mencapai dan menyusuri kawasan wisata sehingga tidak melelahkan, menghubungkan ruang-ruang publik, dan memberikan rasa senang untuk berjalan.

Atribut-atribut pengembangan di atas akan masuk dalam bagian aspek prasarana dan sarana produk wisata. Sehingga dalam aspek prasarana dan sarana terbagi dalam 3 kriteria yaitu kriteria sarana wisata, transportasi dan perancangan. Dalam fenomena saat ini terjadi pergeseran pasar wisata ditunjukkan oleh adanya pergeseran orientasi pengembangan produk wisata.

Konsep pengembangan wisata sebelumnya berorientasi pada pengembangan produk wisata massal (*mass tourism*) yaitu pengembangan skala besar pada budaya korporasi (*corporate culture*) secara multinasional. Pengembangan produk berorientasi pada volume dan target kuantitatif, serta berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Saat ini orientasi produk wisata menuju konsep produk wisata yang berkualitas (*quality tourism*).

Gunn (1994:19) mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil secara optimal didasarkan pada empat aspek yaitu: 1). Mempertahankan kelestarian lingkungannya 2). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. 3). Menjamin kepuasan pengunjung 4). Meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat disekitar kawasan dan zone pengembangannya. Disamping ke empat aspek di atas, kemampuan daya dukung untuk setiap kawasan

berbeda-beda sehingga secara spatial akan lebih bermakna, tergantung pada dimana lokasi pengembangan wisata berada.

Lebih lanjut Gunn (1994:21) merekomendasikan komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam pengembangan kawasan wisata: 1). Atraksi atau sumber daya alam dan budaya 2). Perbaikan infrastruktur transportasi 3). Perbaikan usaha-usaha jasa 4). Perbaikan fasilitas penunjang atraksi 5). Peningkatan pendapatan dan peluang pasar 6). Peningkatan promosi 7). Penguatan organisasi dan kelembagaan yang akan menjalankan program 8). Penguatan kompetensi sumberdaya manusia 9). Penguatan ekonomi lokal, regional dan nasional 10). Dukungan kebijakan lingkungan, politik, dan ekonomi 11. Peningkatan kepuasan wisatawan.

Jafari (Gartner, 1996:23-27) menganalisis empat pendekatan yang mendasari pembangunan pariwisata (tourism platform) yaitu pendekatan advocacy (advocacy platform), cautionary (cautionary platform), Adaptacy platform, dan knowledge-base platform. Advocacy platform menekankan pada dampak ekonomi pariwisata sebagai dasar pijakan.

Pendekatan cautionary merupakan kritik dari pendekatan advocacy menyoroti berbagai dampak negative yang dihasilkan industry pariwisata. Pariwisata tidak selalu baik atau jelek, tergantung pada respons masyarakat lokal terhadap kebutuhannya. Menurut pendekatan ini pembangunan pariwisata harus terfokus pada masyarakat, agar dapat memberikan dampak yang adil pada masyarakat setempat, melindungi

atau meningkatkan budaya dan lingkungan di daerah tujuan wisata dan meningkatkan pertukaran sosial antara tuan rumah dan tamu.

Spillane (1994:28) menguatkan dengan argumentasi bahwa pengaruh negatif pariwisata bisa dikontrol dengan mencari bentuk lain pengembangan wisata (bentuk wisata alternatif). Pengembangannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Knowledge-base platform adalah pendekatan yang menekankan pentingnya pendekatan pariwisata secara holistik. Pendekatan pembangunan pariwisata harus menggunakan model yang multidisiplin atau pendekatan yang interdisiplin. Berbagai dampak negatif yang timbul dalam pengembangan pariwisata yang menggunakan pendekatan advocacy dan cautionary.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, mulai dikembangkan wacana pembangunan pariwisata dengan menggunakan pendekatan adaptasi, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata lebih bersifat mikro menekankan pada bentuk pariwisata yang lebih tertata, berkesinambungan dan menguntungkan masyarakat lokal. Pendekatan adaptasi yang lebih menempatkan pembangunan pariwisata sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau pendekatan bentuk pariwisata berbasis masyarakat mendapat rekomendasi banyak ahli (Murphy, 1985; Mill dan Morison, 1985, Pearce et al. , 1998, Sandmeyer, 2005; Beeton, 2006:69).

Salah satu manfaat yang diharapkan dari pengembangan pariwisata di negara berkembang adalah penciptaan lapangan pekerjaan dan

penyerapan tenaga kerja (Gray, 1974:395; McCloy, 1975:49; Mathieson dan Walls, 1982:43;). Peluang kerja yang timbul dari industri pariwisata menurut Janata (dalam Warpani: 1997:88) dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu sektor dinamik dan sektor statik. Partisipasi ekonomi komunitas dalam dunia usaha pariwisata baik di hulu maupun di hilir menurut Nickerson (2001: 24) berkaitan dengan motivasinya.

Untuk meningkatkan motif dan selanjutnya dapat mendorong partisipasi ekonomi, komunitas harus mendapat dukungan dan bantuan. Pengembangan kewirausahaan dari luar yaitu pemerintah atau NGO atau lembaga donor lainnya (Getz dan Page, 1997:196). Aspek ekonomi pariwisata tidak lepas dari pengeluaran wisata (tourist expenditure) yaitu uang yang dibelanjakan wisatawan di daerah tujuan wisata (DTW) untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan selama berkunjung di suatu negara/daerah tujuan wisata. Uang yang dibelanjakan wisatawan dalam ekonomi pariwisata disebut sebagai uang baru (new money) yang berdampak positif terhadap perekonomian negara/daerah yang dikunjungi (Oka, 2008:187).

Perhitungan pengeluaran wisata penting untuk menunjukkan secara nyata nilai pariwisata bagi suatu daerah. Hal itu juga penting untuk menggambarkan dampak spesifik pariwisata bagi ekonomi lokal seperti rumah tangga, usaha masyarakat lokal, perekonomian daerah dan sebagainya, serta sebagai dasar merencanakan fasilitas atau atraksi wisata baru, menggambarkan dampak pariwisata terhadap penerimaan ekonomi

seperti gaji/upah, pekerjaan, dan yang lebih (Goldman, 1994:1). Penerapan prinsip sosial berkaitan erat dengan adanya interaksi tuan rumah dan tamu/wisatawan. Hubungan antara tuan rumah (masyarakat lokal) dengan pengunjung/wisatawan di daerah tujuan wisata sangat tergantung pada durasi waktu, intensitas, dan sifat kunjungan.

Kedalaman hubungan inilah yang menentukan dampak atau manfaat yang dapat diterima masyarakat di daerah destinasi wisata (Murphy, 1985:117). Page dan Hall (1999:122) merangkum dampak sosial-budaya pariwisata, sebagai berikut. Pengembangan pariwisata membawa dampak positif pada aspek sosial budaya antara lain: meningkatnya partisipasi serta minat komunitas terhadap kegiatan bersama dan menguatkan nilai tradisi setempat.

Sedangkan dampak negatif yang timbul, adalah komersialisasi aktivitas individu, modifikasi kegiatan dan aktivitas sesuai dengan tuntutan pariwisata, peningkatan angka kejahatan, perubahan struktur komunitas, dan kerusakan sosial. Mathiason dan Wall (1982:143) mencatat dampak sosial-budaya yang secara umum timbul dari pengembangan pariwisata adalah efek demonstrasi (demonstration effect).

## **6. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Wisata**

Wisata Pengembangan kawasan wisata sebagai suatu aset kepariwisataan dan aset ekonomi untuk menumbuhkan ekonomi pariwisata di daerah, khususnya di wilayah kawasan, disamping perlu didukung dengan pemenuhan atas sejumlah kriteria dasar di atas, juga harus

dikembangkan dengan menjaga dan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat kawasan setempat. Pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan wisata harus memperhatikan sebagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya dan mata pencaharian Kawasan tersebut. Suatu kawasan dalam pengembangannya atraksi wisata harus disesuaikan dengan adat, budaya ataupun tata cara yang berlaku di kawasan tersebut. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut harus mengikuti tata cara dan adat istiadat yang berlaku di kawasan tersebut.
- b. Pembangunan fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan. Pengembangan pariwisata di suatu kawasan pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di kawasan tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di kawasan dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pengembangan fisik seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih di maksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga Kawasan tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan.
- c. Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian. Arsitektur bangunan, pola lanskap serta material yang digunakan dalam pembangunan

haruslah menonjolkan ciri khas kawasan tersebut sehingga dapat mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat. Bahan-bahan/material yang digunakan untuk bangunan rumah, interior, peralatan makan/minum dan fasilitas lainnya hendaknya memberikan nuansa yang alami dan menggambarkan unsur kelokalan dan keaslian. Bahan-bahan seperti kayu, gerabah, bambu dan sirap serta material alami lainnya hendaknya mendominasi suasana, sehingga menyatu dengan lingkungan alami sekitarnya. Penggunaan bahan-bahan tersebut selain meningkatkan daya tarik kawasan yang bersangkutan juga sesuai dengan konsep dasar lingkungan.

- d. Memberdayakan masyarakat kawasan wisata. Unsur penting dalam pengembangan Kawasan wisata adalah keterlibatan masyarakat kawasan dalam setiap aspek wisata yang ada di Kawasan tersebut. Pengembangan wisata sebagai pengejawantahan dari konsep pariwisata inti rakyat mengandung arti bahwa masyarakat kawasan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di luar aktivitas mereka sehari-hari. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah-rumah penduduk (homestay), penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal seperti andong/dokar, kuda,

pertunjukan kesenian, dan lain sebagainya.

- e. Memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta berwawasan lingkungan pembangunan suatu kawasan menjadi kawasan wisata harus memperhatikan kapasitas kawasan tersebut, baik kapasitas fisik maupun kesiapan masyarakat. Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism) harus mendasari pengembangan kawasan wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik kawasan tersebut.

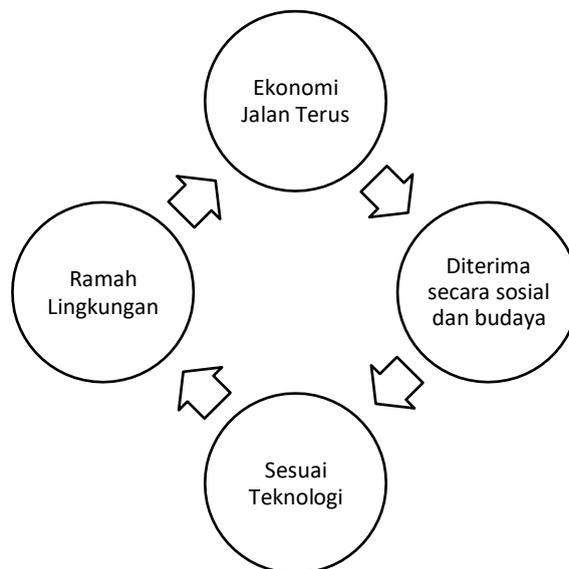
Pendekatan lain dalam memandang prinsip-prinsip pengembangan kawasan wisata adalah: a). Pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan di dalam atau dekat dengan kawasan. b). Fasilitas-fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk kawasan, salah satu bisa bekerja sama atau individu yang memiliki. c). Pengembangan kawasan wisata didasarkan pada salah satu "sifat" budaya tradisional yang lekat pada suatu kawasan atau "sifat" atraksi yang dekat dengan alam dengan pengembangan kawasan sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut. Pengembangan kawasan wisata harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul dapat dikontrol.

Berdasar dari penelitian dan studi-studi dari UNDP/WTO dan beberapa konsultan Indonesia, dicapai dua pendekatan dalam menyusun

rangka kerja/konsep kerja dari pengembangan sebuah kawasan menjadi kawasan wisata (Bappeda, 2015c).

Definisi tersebut diadopsi oleh banyak negara di seluruh belahan dunia dalam berbagai macam variasi. Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya menekankan pada 4 (empat) prinsip, sebagai berikut:

- a. Secara lingkungan dapat berlanjut (*environmentally sustainable*);
- b. Diterima secara sosial & budaya (*socially and culturally acceptable*);
- c. Layak secara ekonomi (*economically viable*);
- d. Pemanfaatkan teknologi yang tepat (*technologically appropriate*)



Gambar 1. Prinsip Sustainable Tourism Development

Prinsip Ramah Lingkungan (*environmentally sustainable*) yang menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan

(baik alam, buatan maupun sosial budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi. Prinsip diterima secara sosial dan budaya (socially and culturally acceptable) yang menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai sosial-budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya sebagai jati diri masyarakat.

Prinsip Ekonomi jalan terus (economically) variable yang menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan. Oleh karenanya, pembangunan harus dilaksanakan secara efisien agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Prinsip Sesuai teknologi (technologically appropriate) yang menekankan bahwa proses pembangunan secara teknis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan sebesar- besar sumber daya lokal, dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang.

Tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang didasarkan atas prinsip-prinsip tersebut, akan bermuara pada 5 (lima) sasaran

sebagai berikut (Bappeda, 2015c): a). Terbangunnya pemahaman dan kesadaran yang semakin tinggi bahwa pariwisata dapat berkontribusi secara signifikan bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi b). Meningkatnya keseimbangan dalam pembangunan c). Meningkatnya kualitas hidup bagi masyarakat setempat d). Meningkatnya kualitas pengalaman bagi pengunjung dan wisatawan e). Meningkatnya dan menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan bagi generasi yang akan datang.

## **7. Pengembangan Pariwisata dan Masyarakat**

Pariwisata dan Masyarakat Lokal Destinasi pariwisata merupakan lokasi produksi, konsumsi dan pola-pola pergerakan wisata (Davidson dan Maitland, 1997:42-85). Selain itu destinasi pariwisata juga sebagai tempat hidup masyarakat untuk bekerja serta melakukan kegiatan sosial dan budaya. Hal tersebut juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dengan demikian masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu destinasi pariwisata, sehingga dalam pengembangan destinasi pariwisata wajib mempertimbangkan berbagai

elemen masyarakat.

Dogra I Made Adikampana 2 dan Gupta (2012:9) menyebutkan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam suatu destinasi pariwisata. Oleh karena itu, keberlanjutan destinasi pariwisata sangat tergantung dari tingkat keterlibatan masyarakatnya dalam pembangunan destinasi pariwisata. Masyarakat di dalam destinasi pariwisata yang kemudian disebut dengan masyarakat lokal mempunyai potensi berupa beragam aktivitas yang dapat dikreasikan menjadi produk pariwisata.

Budaya lokal, tinggalkan masyarakat, serta festival menyediakan keunikan dan sesuatu yang baru dari perspektif wisatawan. Masyarakat dengan pengetahuan dan kebijakan lokal akan lebih memahami produk pariwisata yang dikembangkan serta dampak yang ditimbulkan, dibandingkan dengan masyarakat dari luar destinasi pariwisata. Masyarakat lokal juga mempunyai kontribusi dalam upaya mempromosikan produk destinasi pariwisata, karena masyarakat lokal adalah komponen utama pembentuk citra atau image destinasi pariwisata (Pike dalam Adikampana, 2017: 2).

Begitu pentingnya peran masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan telah mendorong munculnya tren baru pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Oleh Tosun dan Timothy (2003:6-7) ditegaskan bahwa aspek penting dalam pariwisata berkelanjutan adalah penekanan kepada pariwisata berbasis masyarakat.

Pendekatan ini lebih fokus terhadap partisipasi masyarakat lokal

dalam pengembangan destinasi pariwisata. Melalui partisipasi masyarakat, pariwisata secara langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Dengan adanya manfaat inilah penerimaan, dukungan, Pariwisata Berbasis Masyarakat dan toleransi masyarakat terhadap pariwisata akan tumbuh dengan optimal.

Masyarakat lokal merupakan bagian tidak terpisahkan dari destinasi pariwisata. Integrasi masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata dimaksudkan untuk memastikan masyarakat lokal mendapat ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan pariwisata. Kerangka pemikiran integrasi dimulai dari pemahaman mendasar tentang destinasi pariwisata.

Di dalam destinasi pariwisata, tidak hanya terdapat industri pariwisata (produk, pasar, dan akses), melainkan juga ada keterkaitan dengan industri lain termasuk masyarakat lokal. Sehingga dapat dikatakan masyarakat lokal posisinya sangat strategis dan setara dengan pengambil keputusan lainnya (stakeholders) dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan. Walaupun secara konseptual pariwisata berbasis masyarakat diyakini mampu mewujudkan destinasi pariwisata berkelanjutan, namun dalam prakteknya menemui berbagai macam permasalahan (Campbell, 1999; Scheyvens, 2002; Tosun, 2000:627).

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu jenis pariwisata yang memasukkan partisipasi masyarakat sebagai unsur

utama dalam pariwisata guna mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Telfer dan Sharpley, 2008:21). Pemahaman ini sejalan dengan pemikiran Timothy dan Boyd (2003:9) yang menyebutkan pariwisata berbasis masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian manfaat pariwisata. Partisipasi dalam pengambilan keputusan berarti masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyuarkan harapan, keinginan dan kekhawatirannya dari pembangunan pariwisata, yang selanjutnya dapat dijadikan masukan dalam proses pengembangan pariwisata.

Sedangkan mengambil peran dalam pembagian manfaat pariwisata mengandung pengertian bahwa masyarakat semestinya mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial dari pariwisata dan keterkaitan dengan sektor lainnya. Untuk itu pengembangan destinasi pariwisata seharusnya mampu menciptakan peluang pekerjaan, kesempatan berusaha dan mendapatkan pelatihan serta pendidikan bagi masyarakat agar mengetahui manfaat pariwisata (Timothy, 1999:19).

Menurut Murphy (1985:11) pariwisata merupakan sebuah “community industry”, sehingga keberlanjutan pembangunan pariwisata sangat tergantung dan ditentukan oleh penerimaan dan dukungan

masyarakat terhadap pariwisata. Implikasi pariwisata sebagai sebuah industri masyarakat adalah adanya kepastian bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata.

Berhubungan dengan hal tersebut, Tosun (1999:14) membagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Pseudo community participation; non-partisipasi, tujuan pembangunan pariwisata tidak untuk pelibatan kolektif masyarakat, keputusan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok untuk meminimalkan resiko, kebijakan jangka pendek, top-down, tidak langsung, hanya melibatkan elite lokal, dominasi pemerintah. Pariwisata Berbasis Masyarakat.
- b. Passive community participation; hanya sebagai endorsement/ratifikasi keputusan yang dibuat untuk masyarakat bukan dari dan oleh masyarakat, hanya terlibat dalam implementasi, minim kontribusi masyarakat, masyarakat bukan sebagai decision-makers tapi decisiontakers (decision-implementers), efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pihak eksternal.
- c. Spontaneous community participation; partisipasi langsung, partisipasi aktif, dan partisipasi otentik.

Selain itu, pariwisata berbasis masyarakat sering dipahami sebagai sesuatu yang berseberangan dengan pariwisata skala besar (enclave), berbentuk paket (all inclusive), pariwisata massal, dan sedikit

keterkaitannya dengan masyarakat lokal. Sehingga pariwisata berbasis masyarakat disebut juga sebagai pariwisata berskala kecil, dibangun oleh masyarakat lokal, serta melibatkan berbagai elemen lokal seperti pengusaha, organisasi, dan pemerintah lokal (Hatton, 1999 dalam Telfer dan Sharpley, 2008; Leslie, 2012).

Terkait dengan pembangunan pariwisata berskala kecil, Jenkins (1982) telah melakukan perbandingan antara pariwisata skala kecil dengan skala besar untuk mengetahui dampak pembangunan pariwisata terhadap masyarakat lokal. Berdasarkan komparasi tersebut diketahui bahwa pembangunan pariwisata berskala kecil mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dari pembangunan pariwisata berskala besar.

Seringkali partisipasi masyarakat dalam pariwisata disebut sebagai strategi pembangunan alternatif yang terdengar sangat ideal namun dalam implementasinya banyak terdapat tantangan dan hambatan. Scheyvens (2002:22) menyebutkan ada dua tantangan terbesar dalam pariwisata berbasis masyarakat. Pertama, pada kenyataannya masyarakat lokal dalam suatu destinasi pariwisata terbagi ke dalam berbagai faksi atau golongan yang saling mempengaruhi berdasarkan kelas masyarakat (kasta), gender, dan kesukuan. Antar faksi biasanya saling menyatakan paling memiliki atau mempunyai hak istimewa (privilege) keberadaan sumber Pariwisata Berbasis Masyarakat daya pariwisata.

Golongan elite masyarakat tertentu sering berada dalam posisi

mendominasi pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat, lalu memonopoli pembagian atau penerimaan manfaat pariwisata (Mowforth dan Munt, 2016:29). Berdasarkan hal tersebut, partisipasi secara adil (equitable) menjadi pertimbangan penting dalam mendorong pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Selain itu juga isu-isu tentang kelas masyarakat, gender, dan kesukuan penting dipertimbangkan terutama dalam pengembangan pariwisata. Tantangan kedua adalah permasalahan dalam masyarakat untuk mengidentifikasi pariwisata sebagai strategi pengembangan masyarakat lokal.

Masyarakat pada umumnya tidak cukup punya informasi, sumber daya, dan kekuatan dalam hubungannya dengan berbagai pengambil keputusan lainnya dalam pembangunan pariwisata, sehingga masyarakat lokal rentan terhadap eksploitasi. Campbell (1999:16) juga menyatakan hal yang sama bahwa minimnya kesempatan berpartisipasi dalam pariwisata dan sektor lain yang terkait, akibat dari kesulitan yang dialami masyarakat dalam mengidentifikasi manfaat pariwisata. Selain tantangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat juga akan berhadapan dengan berbagai hambatan.

Tosun (2000:19) mengidentifikasi tiga hambatan dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat terutama di negara berkembang. Adapun hambatan-hambatan tersebut berupa : 1). Keterbatasan operasional; termasuk dalam hambatan ini adalah

sentralisasi administrasi publik, lemahnya koordinasi, dan minimalnya informasi pariwisata. 2). Keterbatasan struktural; berupa sikap pelaku pariwisata, terbatasnya tenaga ahli, dominasi elite masyarakat, aturan hukum yang belum tepat, sedikitnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, dan minimnya akses ke modal ekonomi/finansial. 3). Keterbatasan kultural; terbatasnya kapasitas terutama pada masyarakat miskin dan apatis atau rendahnya kesadaran pariwisata masyarakat lokal. Semua jenis keterbatasan tersebut, dapat menciptakan masalah serius dalam partisipasi masyarakat, baik untuk pengambilan keputusan atau pengembangan yang tepat maupun secara bersama-sama membagi manfaat pariwisata.

Integrasi Masyarakat dalam Proses Pengembangan Pariwisata. Sebagian besar karakteristik atau pendekatan perencanaan destinasi pariwisata berbasis masyarakat berasal dari tradisi pengembangan transaksi dan advokasi. Tradisi ini mengutamakan pembelaan terhadap kelompok masyarakat minoritas dan pemberian kontrol yang lebih besar kepada masyarakat lokal dalam proses pembangunan sosial guna mencapai kesejahteraan (Timothy, 1999:25).

Hal tersebut semakin terlihat nyata akibat adanya perubahan paradigma pembangunan pariwisata dari yang bersifat konvensional menuju pariwisata alternatif. Pariwisata alternatif merupakan pariwisata berskala kecil dan melibatkan berbagai elemen lokal terutama masyarakat lokal. Pembangunan pariwisata berskala kecil dapat memberikan ruang

partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal (Telfer dan Sharpley, 2008:31). Pemberian ruang-ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menunjukkan adanya persamaan posisi dengan pengambil keputusan lainnya (pemerintah, investor, dan wisatawan) dalam pembangunan pariwisata.

Berdasarkan pemikiran Derrida dalam Barker (2004:17), persamaan posisi tersebut menandakan pelucutan atas oposisi biner atau dikenal dengan dekonstruksi. Dekonstruksi berfungsi menjamin kebenaran dengan cara mendevalusi bagian inferior oposisi biner yaitu masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Dengan kata lain pendekatan dekonstruktif memastikan dipanggilnya kelompok minoritas untuk masuk ke ranah pariwisata. Kelompok minoritas tersebut tidak lain adalah masyarakat lokal yang pada dasarnya pemilik sumber daya atau modal pariwisata. Pada saat pariwisata masal digulirkan oleh elite atau pemerintah yang berkolaborasi dengan investor, masyarakat lokal hanya berperan sebagai objek pengembangan pariwisata dan akhirnya dengan segala keterbatasan malah terlempar dari pembagian manfaat pariwisata. Kondisi ini melahirkan sebuah konsepsi dekonstruktif yakni integrasi masyarakat lokal dalam proses pengembangan pariwisata.

Lebih lanjut Murphy (1985:10) menekankan dekonstruksi berupa suatu strategi yang terfokus pada pencapaian tujuan pembangunan pariwisata dalam perspektif wisatawan dan masyarakat lokal. Masyarakat lokal seharusnya mampu mengidentifikasi berbagai manfaat pariwisata

untuk Pariwisata Berbasis Masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan pengembangan ini mengakui adanya perhatian dan pemikiran yang memasukkan kepentingan masyarakat dalam pengembangan pariwisata atau dengan kata lain semestinya pariwisata tidak hanya memberikan kepuasan bagi wisatawan, namun juga memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal dan kualitas jasa lingkungan.

Sejalan dengan Murphy, Gunn dan Var (2002: 9) juga berpendapat bahwa jika masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam proses pengembangan, maka akan terjadi malfungsi dan inefisiensi dalam pengembangan pariwisata. Kembali menurut Murphy (1985:25), pariwisata tidak seperti industri lainnya, karena sangat bergantung pada kemauan baik (*goodwill*) dan kerjasama para pengambil keputusan pariwisata termasuk masyarakat lokal, karena masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan/integral dari destinasi pariwisata. Ketika pengembangan destinasi pariwisata tidak sesuai dengan aspirasi dan kapasitas masyarakat, maka yang akan terjadi adalah permusuhan dan resistensi masyarakat lokal terhadap pengembangan pariwisata.

Korten dalam Timothy (1999:27) pada anjurannya menyebutkan bahwa semakin kompleks permasalahan pembangunan yang dihadapi, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengetahuan dan nilai-nilai/kearifan lokal dalam pemecahannya. Penggunaan kearifan lokal untuk merumuskan pemecahan permasalahan pembangunan dikenal dengan sebutan pengembangan berbasis masyarakat lokal. Dengan kata lain,

pendekatan pengembangan ini membutuhkan partisipasi dari berbagai pengambil keputusan dalam proses pengembangan pariwisata.

Adanya partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengembangan, pengembangan pariwisata diharapkan masyarakat mampu mengidentifikasi berbagai dampak pariwisata dan kemudian dapat merumuskan strategi dan program guna mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengembangan destinasi pariwisata. Inskeep (1991:33) menegaskan pentingnya keterlibatan setiap para pengambil keputusan dalam berbagai tahapan atau proses pengembangan pariwisata.

Proses pengembangan merupakan tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata. Proses pengembangan pariwisata meliputi : 1). Persiapan studi; pengenalan karakteristik, potensi dan isu strategis, penganggaran, pemilihan anggota tim, kerangka acuan kerja (KAK), dan administrasi 2). Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan; perumusan tujuan dan sasaran yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu strategis 3). Survei; inventarisasi situasi eksisting dan karakteristik area pengembangan pariwisata 4). Analisis dan sintesis; analisis hasil survei dan sintesis untuk merumuskan rencana dan rekomendasi 5). Perumusan kebijakan dan rencana; merumuskan alternatif pengembangan 6). Rekomendasi; pilihan rencana yang tepat dengan tujuan dan sasaran 7. Implementasi; pelaksanaan rencana terpilih 8). Pengawasan dan evaluasi; pengawasan yang terus menerus dan

memberikan umpan balik guna penyesuaian dan penyempurnaan pengembangan.

## **8. Perkembangan Bentuk Pariwisata**

Bentuk pariwisata dalam prakteknya telah banyak mengalami perkembangan, sampai saat ini setidaknya terdapat dua arus utama bentuk pariwisata yang dikembangkan di dunia, yaitu bentuk pariwisata massal (mass tourism) dan bentuk pariwisata alternatif (alternative tourism), dimana dalam hal pendekatan konseptual keduanya memiliki karakter yang berbeda (Neil dan Wearing, 1999). Tidak ada definisi yang baku mengenai seperti apa pengertian dan bagaimana konsep pariwisata massal itu (Lindberg, Enriquez, dan Sproule, 1997).

Secara umum pariwisata massal diartikan sebagai kegiatan pariwisata yang memiliki banyak komponen dan menghadirkan wisatawan dalam jumlah besar yang secara otomatis akan mendatangkan dampak dan keuntungan yang besar pula (Siswantoro, Anggoro, dan Sasongko, 2012). Sedangkan pariwisata alternatif merupakan bentuk pariwisata yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan dan budaya. Berbeda dengan wisata massal yang menghadirkan wisatawan dalam jumlah besar, wisata alternatif secara kuantitas hanya menghadirkan sekumpulan kecil wisatawan. Meskipun demikian, wisata alternatif menawarkan kedalaman makna dan pengalaman lebih mendalam terhadap objek wisata yang dikunjungi. Perkembangan pariwisata alternatif mengalami beberapa jenis wisata dengan fokus kepada potensi sumber daya alam yang ada di lokasi

wisata, setidaknya pariwisata alternatif dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti green tourism, geotourism, responsible tourism dan sustainable tourism (Theng, 2015: 27).

Jenis pariwisata tersebut hakekatnya memiliki kesamaan, yaitu: Pertama, kelestarian lingkungan menjadi fokus utama. Kedua, adanya pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangannya. Ketiga, adanya proses mencari pengetahuan dan pemahaman mengenai alam dan masyarakat. Keempat, menawarkan kesan dan makna yang lebih mendalam terhadap objek wisata yang dikunjungi.

Garrod (2001:11) menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan terkait dengan prinsip pengembangan yang dikaitkan dengan pariwisata, yaitu: Pertama, merupakan pendekatan yang cenderung formal yang menekankan kepada keuntungan potensial dari ekowisata. Kedua, merupakan pendekatan yang disamakan dengan pengembangan partisipatif dimana adanya upaya untuk menyeimbangkan antara pembangunan dengan pengembangan terkendali. Salah satu bentuk dari pembangunan pariwisata secara partisipatif yaitu Community Based Tourism (CBT) atau diterjemahkan sebagai pariwisata berbasis komunitas/masyarakat, bentuk pariwisata ini memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk turut serta dalam pengembangan pariwisata.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Hausler (dalam Sunaryo, 2013) yang menyatakan bahwa CBT merupakan pendekatan pembangunan pariwisata Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa

Wisata Berbasis Masyarakat yang menekankan kepada masyarakat lokal, baik itu yang terlibat secara langsung maupun tidak terlibat secara langsung. Lebih lanjut Suansri (2003:24) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya.

Pemahaman mengenai pariwisata berbasis komunitas atau masyarakat seperti yang dijelaskan ahli di atas, maka dapat dikatakan masyarakat dalam proses pengembangan kebijakan wisata ditempatkan dalam dua posisi sekaligus; Pertama sebagai objek yang memiliki hak untuk turut menentukan pengembangan pariwisata yang akan dilaksanakan. Kedua, sebagai subjek yang harus mendapat manfaat dan keuntungan dalam pengembangan pariwisata. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman Sunaryo (2013:7) yang menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yaitu: Pertama, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kedua, terdapat kepastian masyarakat lokal menerima manfaat. Ketiga, pemberian edukasi tentang pariwisata kepada masyarakat lokal.

Konsep pengembangan pariwisata secara berkelanjutan tersebut pada intinya menekankan pada 4 (empat prinsip), yaitu: a). Layak secara ekonomi b). Berwawasan lingkungan c). Diterima secara sosial d). Dapat diterapkan secara teknologi Menurut Fennel (1999:16), tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip di bawah ini: a). Untuk membangun pemahaman dan kesadaran

yang semakin tinggi bahwa pariwisata dapat berkontribusi secara signifikan bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi b). Untuk meningkatkan keseimbangan dalam pembangunan c). Untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat setempat d). Untuk meningkatkan kualitas pengalaman bagi pengunjung dan wisatawan e). Untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang.

Konsep pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat, menurut Wearing (2001:132), sukses atau keberhasilan kegiatan budaya dan pariwisata sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas lokal. Karena itu pemberdayaan masyarakat lokal perlu didasarkan pada: a). Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal b). Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal. c). Berorientasi pada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga besar dan berorientasi pada teknologi tepat guna d). Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif e). Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak seminimal mungkin.

Konsep pengembangan pariwisata yang berpihak pada masyarakat miskin, konsep ini dipandang sangat efektif dalam penerapan atau implementasinya untuk mendorong pengentasan kemiskinan, karena:

- a. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Dengan berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait didalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataan tersebut.
- b. Daya tarik sektor pariwisata membentang sampai di daerah terpencil, yang notabene sangat penting karena orang yang sangat miskin hidup dan tinggal di daerah terpencil.
- c. Adanya kesempatan untuk mendukung aktifitas tradisional seperti agrikultur dan kerajinan tangan melalui pariwisata
- d. Fakta bahwa pariwisata merupakan industry yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak, dimana bisa menyediakan pekerjaan bagi wanita dan remaja
- e. Dengan mengesampingkan faktor ekonomi, pariwisata bisa memberikan keuntungan non-material seperti memberikan rasa bangga pada budaya lokal.

Peran Pengembangan Pariwisata dalam Menggerakkan Sektor Usaha. Konsep keterpaduan pengembangan lintas sektor dalam kerangka kerja pariwisata tanpa batas, sektor pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan dan melibatkan banyak sektor, meliputi sektor kehutanan, sektor kelautan, pertanian dan perkebunan, industri dan

perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, kimpraswil, lingkungan, kebudayaan, pendidikan, imigrasi dan hubungan luar negeri.

## **9. Aspek-Aspek Penghambat Pengembangan Pariwisata**

Faktor penghambat pengembangan pariwisata dalam hal ini tidak lepas dari adanya permasalahan yang menyebabkan kurangnya daya tarik wisata yang ada di destinasi wisata. Belum tertata dengan baik berbagai macam potensi wisata maupun sarana dan prasarana objek wisata juga menjadi faktor penghambat pengembangan wisata. Faktor yang menjadi penghambat bisa saja ditemukan dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dari faktor internal misalnya dalam pengembangan destinasi wisata, kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengolah dan mengembangkan potensi wisata, kurangnya lahan untuk dikembangkan, serta kurangnya sarana dan prasarana.

Sedangkan dari faktor eksternal, dukungan dari pemerintah yang belum maksimal membuat pengembangan pariwisata terhambat, misalnya seperti akses jalan yang rusak hingga saat ini belum diperbaiki, ketersediaan listrik yang belum memadai. Hal tersebut tentunya akan menjadi penghambat perjalanan wisatawan yang akan berkunjung.

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya daya tarik objek wisata yang ada misalnya belum dikelolanya dengan baik oleh pihak pemerintah yang berwenang dan belum tertatanya dengan baik aspek prasarana dan sarana yang sebenarnya dapat dijadikan daya dukung untuk pengembangan objek wisata di daerah ini. Keterbatasan prasarana

dan sarana serta pengelolaan terhadap potensi wisata masih belum optimal. Hal tersebut merupakan dampak dari kurangnya alokasi anggaran dana yang diperuntukkan bagi pengembangan sektor pariwisata (Sunaryo, 2013:26).

Beberapa faktor yang Mempengaruhi pengembangan kepariwisataan, faktor penghambat adalah hal atau kondisi yang dapat menghambat atau menggagalkan suatu kegiatan, usaha atau produksi. Heri (2011:25), pengembangan objek wisata pasti tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat seperti berikut ini:

- a. Kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata;
- b. Kurangnya prioritas pembangunan pemerintah kabupaten terhadap sektor pariwisata
- c. Kurangnya kuantitas dan spesialisasi sumber daya manusia pada Dinas terkait
- d. Kurangnya kerja sama dengan investor
- e. Belum terdapat sistem promosi yang menarik
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pada dinas terkait dan objek wisata
- g. Keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata.

Agar dapat mengidentifikasi faktor penghambat dengan jelas maka dapat dijabarkan kedalam dua elemen yaitu: kelemahan dan ancaman (Pearce, 2008 :178) kelemahan adalah keterbatasan atau

kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Ancaman adalah situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor keparawisataan dalam bentuk pengembangan objek wisata misalnya, dapat menimbulkan dampak positif dan negative terhadap tatanan kultur pada masyarakat setempat. Positifnya jika pengembangan objek wisata dapat menarik perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya mereka sendiri. Negatif, Jika pengembangan itu melunturkan nilai-nilai budaya yang sudah ada karena penduduknya lebih termotivasi untuk mengikuti nilai-nilai asing tanpa menghayati esensinya.

Menurut Spilane dalam Andi Risma (2017:92) mengemukakan bahwa parawisata masa kini merupakan produk dari kemajuan sosial. Dengan pengelolaan yang sehat dan tepat, Parawisata merupakan wahana yang baik dalam rangka mencapai kemajuan sosial, Maka pelakusaha objek wisata dalam menjalankan usahanya harus mengefektifkan kinerja mereka, misalnya dengan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen wisatawan dan melakukan usaha promosi yang intensif. Pemerintah berkewajiban untuk membantu dan memberdayakan para pelaku usaha objek wisata dalam meningkatkan kinerja, demi tercapainya tujuan kebijakan parawisata, yang pada gilirannya akan mewujudkan cita-cita terbangunnya kemajuan sosial di daerah objek

wisatanya.

Permasalahan pembangunan keparawisataan di Kabupaten Sidenreng Rappang, pada khususnya bersandar pada polical will pemerintah daerah, yang berkenaan dengan bagaimana segenap potensi nyata yang dimiliki, dapat dioptimalisasikan keberadaannya atau dengan kata lain, bagaimana susbtansi isu parawisata mengalami kondisi kurang tepat atau adanya kesenjangan antara pemerintah daerah antara swasta/pengusaha, dan masyarakat sehingga menjadi permasalahan yang besar dalam memajukan objek wisata.

**Tabel 2.1. Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Disertasi**

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Disertasi	Persamaan	Perbedaan
1	Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansah (2018)	Hasil penelitian menunjukkan model pengembangan pariwisata diusulkan dengan pendekatan pengembangan masyarakat. Pengembangan di kawasan Pantai Rambak dan Pantai Rebo merupakan upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka secara keseluruhan.	Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengembangan pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan tahap awal (beginning), tahap pertengahan (middle), dan tahap lanjutan (advanced)
No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Disertasi	Persamaan	Perbedaan

2	Dodi widiyanto, Joni purwo handoyo, Alia fajarwati (2008)	Hasil penelitian ini menunjukkan usulan strategi pengembangan berdasarkan startegi yang mendasarkan pada strategi kekuatan dan peluang.	Mendeskripsi kan dan menganalisis pengembang an pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengembang an pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan startegi yang mendasarkan pada strategi kekuatan dan peluang.
3	Ade Irma Suryani (2007)	Hasil penelitian menunjukkan Kegiatan pariwisata merupakan salahsatu sektor non migas yang diharapkan memberikan kontribusi yang Cukup besar terhadap perekonomian Negara. Strategis pengebangan pariwisata pada daerah pedesaanyaitu dengan memperhatikan saran dan prasarana yang ada dan penerapan saptapesona pariwisata.	Mendeskripsik an dan menganalisis pengembang an pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengemban gan pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan prasarana perekonomian dan prasarana sosial.
No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Disertasi	Persamaan	Perbedaan

4	Deddy Prasetya Maha Rani (2014)	Bahwa pantai lombang yang merupakan asset pemerintah memberikan sumbangsihnya terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumenep dan otonomi daerah semakin baik tetapi masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata yang terjadi di Sumenep, Madura, Jawa Timur	Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengembangan pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan, konseptualisasi sistem pariwisata
5	Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga (2016)	Hasil penelitian Peran Peran Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Tapanuli Utara dominan sebagai fasilitator dibandingkan dengan peran Lainnya yaitu sebagai motivator dan dinamisator.	Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan Pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengembangan pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan, kualitatif yang bersifat deskriptif.
No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Disertasi	Persamaan	Perbedaan

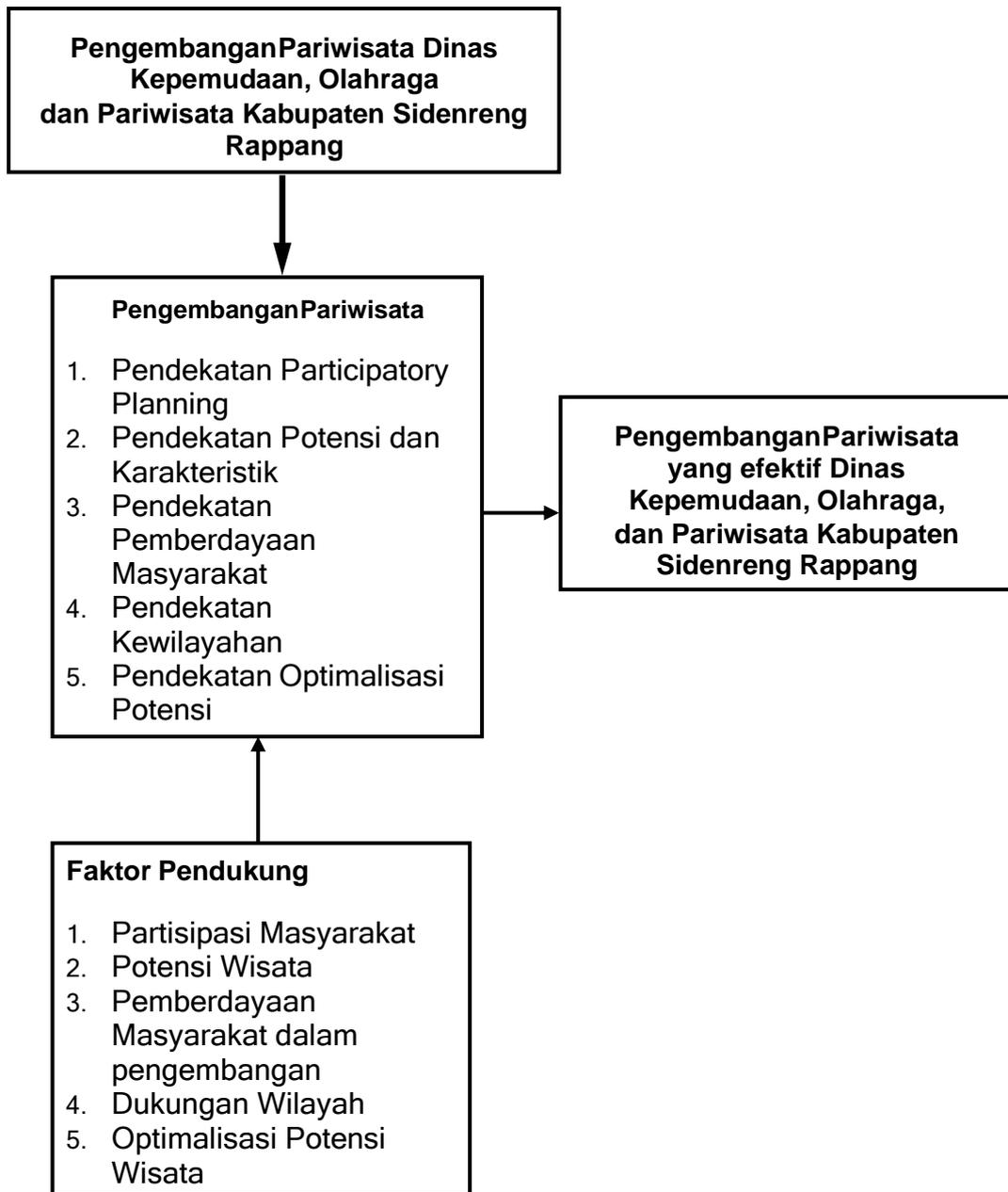
6	Tunggul Prasodjo (2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebutuhan wisatawan secara administratif, berhubungan erat juga dengan kebutuhan pelayanan	Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengembangan pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan, objek wisata, organisasi yang mengelola objek wisata, dan wisatawan
7	Sefira Ryalita Primadan, Mardiyon, Riyanto (2006)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sektor pariwisata memerlukan suatu strategi dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana agar potensi yang di miliki bisa di kembangkan secara optimal.	Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengembangan pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Kualitatif
8	Tri Yuniningsih (2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengembangan pariwisata kota Semarang menggunakan model pentahelix, melibatkan akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis, dan media massa (2) Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS) belum optimal dan (3) Kerjasama antar aktor model dari Hasil penelitian belum optimal.	Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengembangan pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Kualitatif

### C. Kerangka Pikir

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar objek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah.

Sastrayuda (2010:50) mengemukakan bahwa dalam pengembangan pariwisata meliputi aspek :1). Pendekatan Participatory Planning, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam pengembangan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis; 2). Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata; 3). Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok; 4). Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana; 5). Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada

di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.



**Gambar 2. Kerangka Pikir**